



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAITUL IHWAN
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 208701

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 645 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 890.000.000
2. Tanah Seluas 875 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 315.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 23.094.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 445.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.273.094.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.273.094.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FADRINSYAH ANWAR
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 432368

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 157.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.734.905

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.265.234.905

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.265.234.905

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Jujun Endah Wahjuningrum
2. Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
3. NHK : 192357

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.685.000.000

1. Tanah Seluas 966 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/26 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000
7. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 446.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA PRIME 1.5 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 146.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.401.230.900
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	449.554.150
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	13.128.285.050
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.128.285.050

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : M. PRAMINTOHADI SUKARNO
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 204639

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.034.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.115.000.000
2. Tanah Seluas 240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 504.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.115.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 942.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX GASOLINE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 467.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 450.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 5.207.170.766

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 13.633.170.766

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 13.633.170.766



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SAHATTUA P. SIMATUPANG
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 214344

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.151.808.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.630.305.600
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.321.320.000
3. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.182.400

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 406.985.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2008, HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP S.C. HDTP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 379.485.000
3. LAINNYA, KAWASAKI STX 1100 JETSKI Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 309.900.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 995.229.045

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.863.922.045

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.863.922.045

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHJU ADJI HERPRIARSONO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 260682

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m<sup>2</sup>/145 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 985.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m<sup>2</sup>/157 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 705.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. Tanah Seluas 1000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 2866 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m<sup>2</sup>/160 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.210.000.000
8. Bangunan Seluas 42.33 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 690.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT / MOBIL PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000



3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO HYBRID Tahun 2022, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	184.360.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.800.045.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.864.405.000
III. HUTANG	Rp.	2.110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.754.405.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.